

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Provinsi Sumatera Barat yang berada dalam kesatuan Republik ini dimana didalamnya dikenal adanya daerah-daerah otonom sebagai konsekuensi di anutnya asas desentralisasi dengan ketentuan UU No.12 tahun 2008, maka ada 2 (dua) tingkatan daerah otonomyaitu daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiriyang dibagi menjadi daerah tingkat I (Provinsi) dan daerah tingkat II (Kabupaten dan Kota).

Sejalan dengan UU No.12 tahun 2008 tentang pemerintahan daerah dan UU No.33 tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerahserta UU No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan restribusi Kabupaten maupun Kota telah diberikan wewenang untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri melalui otonomi daerah yang mengedepankan adanya kemandirian daerah. Dimana otonomi daerah mensyaratkan adanya kemandirian dibidang pembiayaan/keuangan. Keuangan ini penting karena tidak ada satu kegiatan pemerintahanpun yang tidak membutuhkan pembiayaan. Keuangan merupakan salah satu sumber hidupnya daerah karena otonomi tanpa ditunjang oleh kemampuan keuangan akan lemah sekali.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pinjaman danbantuan lainnya berdasarkan ketentuan UU No.33 tahun 2004 sumber-sumber pendapatan daerah antara lain:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari :
  - 1) Hasil pajak daerah
  - 2) Hasil restribusi daerah

- 3) Hasil perusahaan daerah
  - 4) Lain-lain hasil usaha daerah yang sah
- b. Pendapatan berasal dari pemberian pemerintah yang terdiri dari :
- 1) Sumbangan dari pemerintah
  - 2) Sumbangan–sumbangan lain yang di atur dengan peraturan denganperaturanperundang-undangan
  - 3) Lain–lain Pendapatan yang sah

Dalam otonomi daerah sumber–sumber keuangan daerah Pendapatan Asli Daerah dalam keuangan daerah merupakan salah satu tolak ukur yang nyata,dinamis, serasi dan bertanggung jawab. Pada umumnya daerah di katakan siap untuk melaksanakan otonomi daerah apabila PAD dapat memberikan sumbangan yang berarti kepada APBD. Sumber utama pembangunan daerah harus dapat dibiayai dari PAD, sehingga daerah tidak bergantung dari subsidi pemerintah pusat. Dengan demikian daerah dengan leluasa melakukan akselerasi pembangunan dengan daerahnya tanpa beban pengaruh dari pemerintah pusat sesuai dengan makna dari otonomi daerah yaitu melaksanakan sendiri segala urusan pemerintah di luar kelima urusan yang masih di tangani sendiri oleh pemerintah pusat (Tjip Ismail, Januari : 2004).

Sebagai konsekuensinya menjalankan otonomi daerah yang dimulai pada tahun 2001 Pemerintah Kota berupaya untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Adapun sumber-sumber pendapatanAsli Daerah di Kabupaten Padang Pariaman meliputi pajak daerah, restribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan lain–lain pendapatan yang sah. Dari ke empat sumber pendapatan Asli Daerah tersebut perlu di tingkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang salah satunya adalah dengan meningkatkan efesiensi sumber daya dan sarana yang terbatas,serta meningkatkan efektivitas

pemungutan yaitu pengoptimalkan potensi yang ada serta terus di upayakan menggali sumber-sumber pendapatan yang baru yang kemudian potensinya memungkinkan sebagai kontribusi yang signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Padang Pariaman. Kabupaten Padang Pariaman merupakan Kabupaten yang mempunyai kultur dan nuansa perkotaan yang religius dan juga sebagai diantaranya semakin banyak orang yang bermukim dan menetap sehingga potensi wajib-wajib pajak yang baru dapat meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah.

Untuk lebih jelasnya perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah Padang Pariaman lima tahun terakhir dapat di lihat pada tabel 1.1 di bawah ini :

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Pariaman**  
**Tahun 2002-2016**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	
	Nominal (Ribu Rupiah)	pertumbuhan (persen)
2002	Rp9.050.445.916	-
2003	Rp11.112.485.840	22,78
2004	Rp15.800.000.000	42,18
2005	Rp11.215.610.982	-29,02
2006	Rp12.852.410.416	14,59
2007	Rp16.626.067.000	29,36
2008	Rp23.817.000.000	43,25
2009	Rp22.900.000.000	3,85
2010	Rp24.756.270.000	8,11
2011	Rp27.073.000.000	9,36
2012	Rp31.287.100.000	15,57
2013	Rp42.619.950.000	36,22
2014	Rp62.796.390.000	47,34
2015	Rp72.995.950.834	16,24
2016	Rp85.293.038.167	16,85

Sumber: BPS, 2002-2016

Berdasarkan tabel 1.1 dapat kita lihat bahwa perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Padang Pariaman dari tahun 2002 sebesar Rp9.050.445.916 ribu meningkat menjadi Rp.11.112,485.840 ribu pada tahun 2003 dengan pertumbuhan mencapai 22,78 persen dan pertumbuhan PAD Kabupaten Padang Pariaman, sedangkan pada tahun 2005 PAD mengalami penurunan sebesar 29,02 Pada tahun 2014 dengan pertumbuhan PAD mencapai 47,34 persen dengan nilai mencapai Rp.62.796.390.000 ribu hingga akhir tahun 2016 PAD di Kabupaten Padang Pariaman mencapai Rp.85.293.038.167 ribu dengan pertumbuhan 16,85 persen.

Sumber pendapatan Asli daerah adalah dari hasil pajak daerah, hasil laba dari perusahaan milik daerah dan dari pajak retribusi daerah serta himpunan pendapatan masyarakat daerah dan juga pajak daerah itu sendiri. Adapun pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak bahan galian golongan C, pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, PBB perkotaan dan desa, dan himpunan pendapatan masyarakat daerah. Pajak-pajak daerah tersebut diharapkan dapat meningkatkan PAD, selain dari hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan perusahaan dan juga himpunan pendapat masyarakat daerah itu sendiri sehingga dapat digunakan untuk pembangunan. Dengan demikian hasil pungutan dari sektor pajak akan dapat lebih berperan dalam menunjang usaha-usaha pembangunan khususnya pembanguann yang dilaksanakan di Kabupaten Padang Pariaman.

Kabupaten Padang Pariaman memiliki potensi sumber daya alam dan manusia yang cukup besar memacu perkembangan sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik mengambil judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2002 Sampai 2016”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapatdirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas. Adapun ruang lingkup pembahasannya berkisar pada:

- 1) Seberapa besar pengaruh DAU terhadap PAD Kabupaten Padang Pariaman?
- 2) Seberapa pengaruh Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Padang Pariaman?
- 3) Seberapa besar pengaruh Retrebusi daerah terhadap PAD Kabupaten Padang Pariaman?

## **1.3 Tujuan dan manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan penelitian**

Adapun yang menjadikan tujuan dalam melakukan peneltian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menganalisis pengaruh DAU terhadap PAD Kabupaten Padang Pariaman.
- 2) Untuk menganalisis pengaruh Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Padang Pariaman.
- 3) Untuk menganalisis Pengaruh Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Padang Pariaman.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut

- a. Dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan dapat sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijaksanaan pengembangan penerimaan PAD pada masa yang akan datang di Kabupaten Padang Pariman.
- b. Bagi masyarakat diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan yang lumrah dan bisa di pahami tentang Pendapatan Asli Daerah.
- c. Bagi para pembaca bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang pajak daerahnya masing-masing.